PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan H.M. Rafi'i Nomor 3 Pangkalan Bun Kalimantan Tengah 74112,

Telpon (0532) 21052 Fax. (0532) 21052

Website : bappeda.kotawaringinbaratkab.go.id, E-Mail : bappedakabkobar@yahoo.com

LAPORAN PERJALANAN DINAS

Kepada Yth : Kepala Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat
: Sekretaris Bappeda Kaabupaten Kotawaringin Barat
: Kepala Bidang/Kepala Sub Bidang/Kepala Sub Bagian, Bappeda Kab. Kobar
: Seluruh ASN Bappeda Kab. Kobar

Dari : Kepala Sub Bidang Prasarana Perhubungan dan Infrastruktur

Tanggal : 10 Juli 2019

Perihal : Laporan Perjalanan Dinas Mengikuti Kaji Tiru Penghargaan Pembangunan daerah (PPD) Kab. Temanggung, Jawa Tengah

1. Dasar :

- a. Surat Kepala Bappeda Kab. Kobar, Nomor : 050/336/Bapp-I/2019 perihal Kaji Tiru Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah;
- b. Surat Perintah Tugas Nomor : 841.5/110/Bapp-I/2019;
- c. Surat Perintah Perjalanan Dinas An. Nomie Hartati, ST, nomor : 094/272/Bapp-I/2019.

2. Waktu Pelaksanaan :

Tanggal 8 Juli 2019, bertempat di Aula Bupati Temanggung dan Kantor Bappeda Kab. Temanggung, Jawa Tengah.

3. Hasil :

- a. Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah meraih penghargaan Pembangunan Daerah pada peringkat kedua dalam kategori perencanaan dan pencapaian terbaik tingkat kabupaten. Dengan mengusung konsep **"Musrenbang Kami Beda"** Pemerintah Daerah memberikan jaminan bahwa hasil musrenbang 99 persen muncul di APBD sehingga usulan dari bawah tidak akan hilang;
- b. Jaminan hasil Musrenbang RKPD 99 persen muncul di APBD sehingga usulan dari bawah tidak akan hilang karena ada pagu indikatif umum dan pagu indikatif tematik dan uang itu ada ditingkat kecamatan.
  - **Pagu indikatif umum** : digunakan untuk mengakomodir usulan prioritas kegiatan pada musyawarah bidang Musrenbang RKPD di Kecamatan yang akan diusulkan pada Musrenbang RKPD di Kabupaten.
  - **Pagu tematik** : diusulkan oleh camat berdasarkan pelimpahan urusan, pengembangan potensi dan inovasi unggulan dan permasalahan/isu strategis kecamatan. Pagu tematik juga memberikan kesempatan kepada camat untuk mengusulkan kegiatan sesuai dengan pelimpahan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Bupati kepada camat, memberikan kesempatan kepada Camat untuk mengusulkan kegiatan dalam rangka pengembangan potensi unggulan dan inovasi di wilayah kecamatan, dan memberi kesempatan kepada Camat untuk mengusulkan kegiatan dalam rangka percepatan penyelesaian permasalahan strategis di wilayah kecamatan.
- c. Pelaksanaan Musrenbang RKPD diatur dalam Peraturan Bupati No. 100 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Temanggung, dengan didukung oleh :
  - Peraturan Bupati No.46 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Temanggung;
  - SK No. 690/422 tahun 2014 tentang Ruas-Ruas Jalan yang berstatus sebagai jalan desa.

- d. Inovasi unggulan perencanaan daerah adalah ditekankan pada pelaksanaan Musrenbang RKPD yaitu :
- Musrenbang RKPD di Kelurahan : Telah menetapkan pagu indikatif untuk pembiayaan belanja sarana prasarana lokal dan pemberdayaan masyarakat. Penetapan pagu menggunakan indikator berupa luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, jumlah RT dan jumlah RW. Sedangkan untuk penetapan prioritas menggunakan skoring;
  - Musrenbang RKPD di Kecamatan : Telah dibagi menjadi Pagu Indikatif Umum dan Pagu Indikatif Tematik (sesuai penjelasan pada point b);
  - Dana pokok pikiran DPRD (aspirasi) pembangunan yang berbasis kewenangan desa bisa berupa pemberdayaan masyarakat maupun infrastruktur dan pengembangan ekonomi masyarakat. DPRD telah dilibatkan sejak awal proses perencanaan.

4. Rekomendasi Tindak Lanjut Kegiatan :

- a. Tema Pembangunan, tujuan, sasaran dan prioritas RKPD berdasarkan RPJMD harus di rumuskan sejak awal sehingga pada saat pelaksanaan musrenbang desa, Musrenbang RKPD di kecamatan dan kelurahan, usulan dari bawah telah sinkron dengan tema pembangunan yang ditetapkan;
- b. Bappeda harus membuat pedoman pelaksanaan Musrenbang RKPD melalui Peraturan Bupati sebagai dasar pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan kabupaten;
- c. Sebagai data dukung penyusunan perencanaan dan pembagaaan kewenangan antara desa dengan kabupaten dalam hal perencanaan dan pembangunan wilayah, agar Bappeda menghimbau SKPD teknis membuat surat ketetapan hal-hal yang menjadi kewenangan penanganan Pemerintah Kabupaten (misal: SK penetapan ruas jalan kabupaten, SK jaringan irigasi, SK lahan pertanian, dll);
- d. Dalam penetapan pagu indikatif Kecamatan ditetapkan secara proporsional berdasarkan variabelnya, serta penekanan tema pembangunan di setiap kecamatan disesuaikan dengan potensi daerah yang dapat dikembangkan dan memberikan kesempatan kepada Camat untuk mengusulkan kegiatan dalam rangka percepatan penyelesaian permasalahan/isu strategis di wilayah kecamatan;
- e. Perlu dilakukan penguatan dan pemahaman sumber daya manusia baik ditingkat desa, kelurahan, kecamatan dan SKPD dalam pelaksanaan rencana pembangunan daerah sehingga konsistensi perencanaan pembangunan terjaga (perencanaan bergaransi);
- f. Evaluasi capaian pembangunan sangat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah, untuk itu agar seluruh sub bidang dapat melakukan analisa terhadap capaian pembangunan daerah serta melakukan inovasi-inovasi dalam rangka mendorong percepatan pencapaian kinerja pemerintah daerah.

Demikian laporan perjalanan dinas ini disampaikan, dan mohon arahan pimpinan.

Dokumentasi Kegiatan Kaji Tiru di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah

Mengikuti Kegiatan Pembukaan Perkemahan Ilmiah Remaja Regional Jawa Tengah, di buka oleh wakil Bupati Temanggung, Drs. R. Heri Ibnu Wibowo di Aula Bupati Temanggung

Ramah Tamah bersama wakil Bupati Temanggung, Drs. R. Heri Ibnu Wibowo dan Sekretaris Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) di Ruang Tamu Bupati Temanggung

Diskusi di Aula Bappeda Kab. Temanggung dipimpin Plt. Kepala Bappeda, Ripto Susilo bersama perwakilan OPD, Camat, Lurah dan beberapa masyarakat

Foto bersama Plt Kepala Bappeda Kab. Temanggung dan Kepala Bidang Perencanaan Bappeda Kab. Temanggung

Observasi lapangan ke beberapa lokasi kelurahan yang melakukan inovasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat, salah satunya adalah “Kampung Proklim”

Kalimat diatas merupakan "Kalimat Penutup" pada Paparan PPD di Bappenas
Oleh Plt. Kepala Bappeda Kab. Temanggung
Sehingga kata ini menjadi kunci keberhasilan dalam pembangunan daerahnya.